

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**NINDY ADRIYANI RIFANDA  
NPM: 1621020097**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2020 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**NINDY ADRIYANI RIFANDA  
NPM 1621020097**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2020M**

## ABSTRAK

Fakir miskin diartikan sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya sendiri dan/atau keluarganya. Pada tahun 2011 presiden telah mengesahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana dengan dikeluarkannya undang-undang ini diharapkan dapat membantu orang-orang yang sangat kekurangan serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun hidup keluarganya. Pemerintah bekerja sama dengan beberapa lembaga termaksud Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menerapkan undang-undang tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut yaitu, Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam penanganan fakir miskin. Penelitian ini termaksud dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi *editing* dan *coding*. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deduktif*. Hasil dari penelitian ini diantaranya, yaitu: *Pertama*, implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah terimplementasi dengan menjalankan program-program penanganan fakir miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Pada tahun 2010 sebelum disahkannya undang-undang penanganan fakir miskin, kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat banyak. Bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Melalui Program Keluarga Harapan yang sudah berjalan sejak tahun 2011 di Kota Bandar Lampung sudah menunjukkan hasil yang sangat optimal karena jumlah penduduk miskin setiap tahunnya mengalami penurunan. *Kedua*, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa pemerintah harus berlaku adil dalam memberikan penanganan terhadap fakir miskin. Dinas Sosial kota Bandar Lampung menjalankan program penanganan fakir miskin yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako dalam hal ini pemerintah harus menjalankan sesuai dengan surat An-Nisa 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil terhadap seluruh masyarakat, guna menciptakan masyarakat yang sejahtera.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindy Adriyani Rifanda  
NPM : 1621020097  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, November 2020  
Penulis



Nindy Adriyani Rifanda  
NPM: 1621020097





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarama Bandar Lampung, Telp.(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Nama : Nindy Adriyani Rifanda

NPM : 1621020097

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., MH.**  
**NIP. 196201111994031001**

**Pembimbing II,**

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**  
**NIP. -**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)"** di susun oleh Nindy Adriyani Rifanda, NPM: 1621020097, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Selasa, 29 Desember 2020.

**Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag., M.H**

**Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**

**Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**Mengetahui  
Dekan fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H  
NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

أَنْ تُوَدُّوا أَلَّا مَنَنْتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
 ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعِظُوا بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS. An-Nisa: 58)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *An-Nisa* 58, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).



## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan hidayahnyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa penulis dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan selalu dengan penuh semangat baik dalam keadaan suka maupun duka selalu senantiasa mendukung dan mendoakanku disetiap waktu. Dengan ketulusan dan kerendahan hati kututurkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Riskandar dan Ibunda Sri Fatmaningsih yang telah membesarkanku dengan penuh rasa kasih sayang, yang senantiasa merawatku, mendidikku dari aku kecil hingga aku dewasa ini. Terimakasih atas dukungan, perjuangan, motivasi, arahan serta ketulusan do'a yang kalian berikan kepadaku. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku ucapkan mungkin tidak akan pernah cukup untuk membalasnya, semoga Allah SWT yang akan membalas kemuliaan hati kalian berdua.
2. Kedua adikku Dzaky Aditya Rifanda dan Elvaretta Rameyza Rifanda yang penulis banggakan yang selalu senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Terakhirku persembahkan skripsi ini untuk keluarga besarku, keluarga besar yang selalu mendo'akan ku.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Nindy Adriyani Rifanda, dilahirkan pada tanggal 12 Desember 1998 di kota Bandar Lampung, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Ayah Riskandar dan Ibu Sri Fatmaningsih.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Al-Azhar II Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Gajah Mada Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, selama duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama penulis aktif dalam OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Pada Sekolah Menengah Akhir penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 12 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis diterima melalui jalur undangan atau SPAN PTKIN di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai mahasiswi di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah) Fakultas Syariah pada semester 1 Tahun Akademik 1437H/ 2016M.

Bandar Lampung,    November 2020  
Yang Membuat,

Nindy Adriyani Rifanda

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi rintangan dan hambatan yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil hingga sampai terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan yang berharga ini penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua ku Ayah Riskandar dan Ibu Sri Fatmaningsih yang selalu memberikan do'a, perhatian, motivasi, dukungan, serta kasih sayang yang luar biasa kepada penulis.
7. Kedua adik-adikku Dzaky Aditya Rifanda dan Elvaretta Rameyza Rifanda yang mampu menjadi penghibur disaat penulis merasa lelah.
8. Muhammad Fathir ku ucapkan terima kasih karena sudah memberikan motivasi, semangat, serta telah menemani proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-temanku Tri Okta, Mutia Resta, Irinna Pinka, Chika Hani, Sucinadia, Dewi Ps dan semua yang tidak dapatku sebutkan satu persatu disini, terima kasih kepada kalian yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka, selalu senantiasa memberikan dukungan yang tiada

henti kepadaku. Serta ku ucapkan terimakasih pula kepada teman-teman seperjuanganku Eggy, Dani, Tegar, Halim, serta yang lainnya.

10. Teman-temanku satu angkatan 2016 khususnya kelas Siyasa B terimakasih karena kalianlah masa kuliahku penuh cerita dan penuh warna.
11. Terimakasih kepada teman-teman kelompok KKN 15 yang telah melaksanakan 40 hari dengan 11 sifat yang berbeda-beda.
12. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap agar karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

Bandar Lampung, November 2020  
Penulis

**Nindy Adriyani Rifanda**  
NPM. 1621020097



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	6
D. Fokus Penelitian .....	14
E. Rumusan Masalah .....	14
F. Tujuan Penelitian.....	15
G. Signifikan Penelitian .....	15
H. Metode Penelitian.....	16

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori	
1. Fakir Miskin .....	26
a. Pengertian Fakir Miskin.....	26
b. Bentuk-Bentuk Kemiskinan.....	28
c. Faktor Terjadinya Kemiskinan .....	30
d. Indikator Kemiskinan .....	36
e. Hak dan Tanggung Jawab Fakir Miskin .....	49
f. Penanganan Fakir Miskin.....	41
2. Hukum Islam .....	48
a. Pengertian Hukum Islam .....	48
b. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	49
c. Tujuan Hukum dalam Islam .....	50
d. Arti Fakir Miskin dalam Islam.....	55
e. Prinsip Pemberdayaan Fakir Miskin .....	58
f. Penanganan Fakir Miskin dalam Islam.....	61
B. Tinjauan Pustaka .....	68

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	74
1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....	74

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	78
3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....	79
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....	80
B. Penanganan Fakir Miskin di Kota Bandar Lampung .....	90

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....	105
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanganan Fakir Miskin di Kota Bandar Lampung .....	111

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	116
B. Rekomendasi .....	117

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2020 .....	89
2. Jumlah Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	98
3. Rekap Jumlah Penerima PKH Kota Bandar Lampung tahun 2020 .....	100



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Pra Riset.

Lampiran 2. Surat Permohonan Jawaban Pra Riset.

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Riset.

Lampiran 4. Surat Keterangan Kesbangpol.

Lampiran 5. Pedoman Wawancara.

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Riset Penelitian.

Lampiran 7. Kartu Konsultasi Skripsi.

Lampiran 8. Keterangan Hasil Turnitin.

Lampiran 9. Foto Dokumentasi Wawancara.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Impelementasi pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
  - a. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>2</sup>
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang merupakan ketentuan dan peraturan Negara, dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>3</sup> Undang-Undang berfungsi sebagai otoritas, pengaturan, pengarahan, pemberian saksi, untuk mendeklarasikan atau dalam pembatasan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan peraturan

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 352.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h.138.

yang membahas khususnya tentang penanganan fakir miskin yang berasaskan kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi, kesetiakawanan, dan pemberdayaan.<sup>4</sup>

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan fakir miskin.

## 2. Penanganan Fakir Miskin

### a. Penanganan

Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Penanganan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

### b. Fakir Miskin

Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengartikan fakir miskin sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 2.



pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

3. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Perspektif sebagai sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain, memandang satu masalah dengan satu kajian cukup mendasar dengan menggunakan satu kajian ilmu.
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul dan tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, yang dimaksud disini hukum Islam adalah segala aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist.<sup>5</sup>
5. Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
  - a. Studi merupakan salah satu metode penelitian dalam suatu ilmu sosial yang dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji kebenarannya.<sup>6</sup>
  - b. Dinas Sosial adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.<sup>7</sup> Dinas Sosial menurut penulis yaitu suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan di bidang sosial.

---

<sup>5</sup>Amir Syaripudi, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.9.

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,2013), h. 153.

<sup>7</sup>Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

c. Kota Bandar Lampung adalah salah satu kota yang terdapat di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Penulis memilih tempat lokasi di Kota Bandar Lampung dikarenakan masih banyaknya fakir miskin yang ada di Kota Bandar Lampung ini.

Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dan data yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan maksud dari “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” adalah suatu penelitian secara ilmiah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin, yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana implementasi dan penerapan penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang kemudian akan ditelaah dalam hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung), antara lain:

## 1. Alasan Objektif

- a. Adanya orang-orang fakir miskin yang dapat kita jumpai khususnya di Kota Bandar Lampung menjadi sebuah masalah yang sangat memprihatinkan sehingga penulis menganggap perlu melakukan sebuah penelitian mengenai penanganan fakir miskin.
- b. Masalah fakir miskin ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

## 2. Alasan Subjektif

Penulis memiliki beberapa alasan yang dapat diuraikan dalam alasan subjektif ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tema “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” menurut penulis sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji.
- b. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung), sehingga penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

### C. Latar Belakang Masalah

Orang fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan masyarakatnya.<sup>8</sup> Miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup> Jadi, fakir miskin merupakan orang yang sengsara hidupnya mereka tidak mempunyai harta ataupun penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk mempertahankan hak-hak dasarnya serta bertahan hidup saja tidak mampu, apalagi mengembangkan kehidupan yang layak. Fakir miskin juga dapat dikaitkan dengan keterbatasan penduduk untuk memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fakir miskin terjadi karna berawal dari suatu kemiskinan, sedangkan kemiskinan ini menjadi masalah besar disetiap negara khususnya di Indonesia, bertambahnya jumlah penduduk tetapi kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga mereka tidak mempunyai sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun kebutuhan hidup keluarganya, dari salah satu faktor inilah banyak orang-orang fakir miskin yang masih sering kita jumpai.

---

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Edisi Kedua Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009), h.420.

<sup>9</sup>*Ibid.*



Kemiskinan memang sudah menjadi masalah fenomenal, sebagai contoh kemiskinan juga berdampak pada anak-anak sekalipun karna orang tua mereka tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, sehingga membuat anak-anak yang sudah cukup umur untuk sekolah tidak dapat duduk dibangku pendidikan bahkan banyak juga diantara mereka yang sudah bersekolah tetapi harus terpaksa untuk putus sekolah. Padahal dampak fakir miskin terjadi akibat kurangnya pendidikan yang layak sehingga banyak anak-anak dibawah umur yang hidup terlantar dijalanan karna putus sekolah, banyak diantara mereka akan menghabiskan waktunya sehari-hari untuk mengamen, mengasong, bahkan ada pula yang mencopet. Akibat kurangnya pendidikan juga akan membuat seseorang menjadi kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan karna mereka tidak memiliki kemampuan yang dapat digunakan dalam melamar kerja.

Masih banyak masyarakat di Indonesia khususnya di kota Bandar Lampung yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini membuat bertambahnya persoalan negeri ini tidak lepas dari kata kemiskinan. Hal yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakatnya untuk lari dari kata kemiskinan ini dengan menyelenggarakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut mencakup upaya-upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, perluasan kesempatan kerja,

pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendamping usaha.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pemerintah membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang penanganan fakir miskin.

Undang-undang adalah produk politik<sup>11</sup>, memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, guna mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya. Sebelum disahkan undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-Undang sendiri dibagi menjadi dua arti yaitu: undang-undang dalam hukum formal ialah undang-undang yang mempunyai bentuk tertentu dan dibuat oleh suatu badan tertentu, dan undang-undang dalam arti material adalah undang-undang yang isinya sangat penting karna mengenai hak-hak rakyat.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 7 Ayat (1).

<sup>11</sup>Syahrul Mustofa, *Yudisialisasi Politik, Pertempuran dan Penggeseran Kekuasaan Politik dan Hukum Dalam Judicial Review*, (Mataram: Guepedia, 2014), h.16.

<sup>12</sup>C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Penghantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.129.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum adalah bagaimana negara Indonesia dapat memakmurkan rakyatnya yang tergolong fakir miskin dan terlantar dengan adil. Tugas negara adalah membebaskan kondisi rakyat fakir miskin dan rakyat yang terlantar dengan cara melindungi, memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya agar mereka keluar dari kata kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.<sup>13</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di sebutkan bahwa pemeritah yang berwenang dalam pemeliharaan fakir miskin di tingkat daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah daerah provinsi bertugas memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 Ayat (3).

miskin lintas kabupaten atau kota. Memfasilitasi, mengoordinasi, serta mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas kabupaten atau kota. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten atau kota. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas kabupaten atau kota. Mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.<sup>14</sup>

Setiap manusia pada dasarnya terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu hak atas kebebasan, hak hidup dan hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Hukum melindungi rakyatnya dari tindakan berbahaya, tindakan merugikan bahkan sampai tindakan yang mengancam hidupnya baik dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Hukum berfungsi dalam konteks kehidupan bermasyarakat adalah melindungi hak-hak setiap manusia agar tidak dilanggar oleh orang lain,<sup>15</sup> tidak terkecuali terhadap masyarakat yang ada dalam kondisi fakir dan miskin.

Kemiskinan memang selalu menjadi permasalahan serius di setiap negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Kemiskinan harusnya menjadi masalah bersama bukanlah masalah pribadi,

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 30 Ayat (1).

<sup>15</sup>Sri Murtono, Hassan Suryono, Martiyo, *Pendidikan Keluarganegaraan*, (Jakarta: Yudistira, 2006), h.8.



golongan ataupun pemerintah saja, akan tetapi ini menjadi masalah bersama sebagai sesama warga Indonesia. Oleh karena itu pemerintah wajib mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat membuat masyarakat miskin mendapatkan haknya dan memberikan arahan untuk dapat mengembangkan potensi diri mereka supaya mereka bisa berkembang sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi dirinya sendiri ataupun keluarganya.

Indonesia adalah negara yang berasaskan pada hukum sebagai negara hukum maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari pasal tersebut menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini lembaga atau organisasi yang memiliki tugas membantu pemerintahan di bidang sosial adalah Dinas Sosial dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial kota Bandar Lampung.

Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang secara khusus membahas persoalan tentang penanganan fakir miskin agar pemerintah khususnya dinas sosial dapat mengambil langkah dalam mensejahterakan fakir miskin yang lebih terarah.

Fakir miskin menurut imam Syafi'i adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, atau memiliki sedikit harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, adapun miskin merupakan seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pandangan Islam, miskin (*al-miskin-masakin*) atau *faqir* (*al-faqr*) indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap individu di dalam masyarakat (sandang, pangan, dan papan) tidak dipenuhi, termasuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan, sekalipun yang terakhir ini merupakan tanggung jawab negara secara langsung.

Fakir miskin masih banyak yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan masih sering ditemukan kebijakan yang tidak sesuai dengan sasaran sehingga fakir miskin yang seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi tidak terpenuhi dengan baik.

Adapun dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan umatnya untuk berlaku adil. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat karena dibangun di atas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia

diperintahkan untuk berlaku adil. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT nikmat tersebut senantiasa harus dijaga dan dilestarikan supaya tercipta peraturan yang baik, adil dan dapat dipatuhi oleh setiap umat ataupun masyarakat. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58)<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat yang dikutip, ada relevansinya permasalahan penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu harus menjalankan tugas dengan baik, adil dan amanah sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 58 tersebut.

Uraian latar belakang di atas mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap implementasi atau penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial kota Bandar Lampung apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan belum terlaksana sama sekali.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *An-Nisa ayat 58*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Dengan adanya fokus penelitian maka akan membantu peneliti dalam menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan bagaimana prespektif hukum Islam dalam penanganan fakir miskin di Kota Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam dalam penanganan fakir miskin di kota Bandar Lampung?



## **F. Tujuan Penelitian**

Penulis akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian<sup>17</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam dalam penanganan fakir miskin di Kota Bandar Lampung.

## **G. Signifikan Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan sosial yang ada terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam

---

<sup>17</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 89.

menangani fakir miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam.

- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan pemendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata negara.
- c. Untuk menambah referensi bahan literatur atau pustaka khususnya dalam memahami Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran keilmuan di bidang hukum, khususnya peran Dinas Sosial dalam upaya melakukan penanganan fakir miskin dan sebagai referensi untuk dijadikan penelitian lanjutnya.
- b. Kegunaan praktis, peneliti mengharapkan dengan adanya skripsi ini bisa membantu memecahkan masalah dan bisa menjadi salah satu bahan ajaran untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>18</sup> Menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Pentingnya metode penelitian agar dalam pelaksanaan penelitian dapat dengan mudah penulis mendapatkan data atau fakta sebagaimana tujuan penelitian ini di pertanggung jawabkan kebenarannya secara keilmuan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapat informasi dan data dalam melaksanakan suatu penelitian. Maka adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahannya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>19</sup> Dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, data yang

---

<sup>18</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.24.

<sup>19</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.12.

diteliti adalah data yang diperoleh di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melalui ketua, sekretaris dan pegawai, hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, jadi untuk mendapatkan informasi tentang penerapan undang-undang di kota Bandar Lampung penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan penanganan fakir miskin. Sedangkan untuk data sekunder penulis memperoleh dari buku-buku dan dokumen lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan, seperti perundang-undangan.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif adalah metode mengumpulkan informasi actual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan secara system fakta atau karakteristik populasi tertentu.<sup>20</sup> Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data yang didapat dari naskah wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah bahan informasi untuk berfikir gamblang (*eksplisit*), kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,h.29.

<sup>21</sup>*Ibid.*,h.7.

sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.<sup>22</sup> Adapun sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan dengan cara empiris yaitu berdasarkan fakta di lapangan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang mewakili di bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah, Undang-Undang dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.<sup>23</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta jurnal dan buku-buku pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.111.

<sup>23</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.9.



### 3. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>24</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>25</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung baik itu kepala bidang dan anggota di bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

#### b. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi satu persatu.<sup>26</sup>

Adapun teknik sampling (pengambilan sampel) yang digunakan adalah teknik *proposive sampling* teknik ini berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat

---

<sup>24</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.120.

<sup>25</sup>Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Cv. Andi Ofside,2010), h.21.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h.120.

dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.<sup>27</sup> Peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan lokasi dari pada problem yang diperoleh peneliti pada saat pra-penelitian dan objek kajian yang sesuai pada penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, subjek yang dijadikan sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini yaitu pertama Elvira Yusna Murti selaku Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial, kedua Santoso Adhy selaku kepala bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, serta Heri Purwanto selaku Seksi Data dan Informasi.

Pihak tersebut peneliti pilih karna alasan pihak-pihak tersebut berkompeten dalam menangani penanganan fakir miskin, agar peneliti mendapatkan data atau informasi terkait proses penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>28</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden,

---

<sup>27</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, h.130.

<sup>28</sup>*Ibid*, h.134.

dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.<sup>29</sup> Wawancara terbagi atas dua katagori yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur berarti peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak di gali dari sumbernya. Pada keadaan seperti ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diwawancarai secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan alat sebagai penunjang penelitian seperti salah satu contoh kamera untuk foto, alat bantu recorder dan sebagainya.

Adapun wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara secara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman atau daftar-daftar pertanyaan wawancara yang berisi pertanyaan yang spesifik, namun hanya memuat bagian-bagian penting dari masalah yang ingin digali atau yang ingin dibahas dari reponden.

Adapun responden yang akan diwawancarai atau diminta informasi dan data adalah pihak yang terkait, yaitu: Kepala Bidang dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, serta Seksi Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,h.158.

Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.<sup>30</sup>

## 5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

### a. *Editing* atau penyuntingan

Pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki. Hal yang harus diperhatikan dalam proses penyuntingan ini yaitu kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang di ajukan, kelengkapan pengisian daftar pertanyaan, dan ketetapan jawaban responden.

### b. *Coding* atau pengkodean

Apabila tahap editing telah selesai, catatan jawaban dipandang sudah cukup rapi dan menghasilkan data yang baik dan cermat, maka kegiatan *coding* dapat segera dilakukan. *Coding* adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Klasifikasian itu dilakukan dengan cara menandai

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

masing-masing jawaban itu dengan kode tanda tertentu, lazimnya dalam bentuk angka.<sup>31</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan membuat suatu deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta keterkaitan antara unsur-unsur mengenai subjek yang diteliti.

Metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan akhir.<sup>32</sup> Dalam penelitian kualitatif menganalisis data harus berpihak dan hanya membahas hasil yang menempatkan partisipan dalam posisi yang menyenangkan.<sup>33</sup>

Menurut Amirrudin dan Zainal Asikin, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>34</sup> Data mungkin berasal dari naskah

---

<sup>31</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.272.

<sup>32</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, h.5.

<sup>33</sup>Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.131.

<sup>34</sup>Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.25.



wawancara, rekaman, catatan lapangan, dokumen pribadi, video, dan dokumen resmi.

Penulis juga menggunakan analisis data secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dari pengetahuan umum, lalu ditarik kesimpulan yang lebih khusus dari suatu hal atas kasus. Keadaan yang nyata dalam penelitian di lapangan secara global lalu dibandingkan dengan hukum yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup>Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.32.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Fakir Miskin**

##### **a. Pengertian Fakir Miskin**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Penanganan Fakir Miskin mengartikan fakir miskin itu sendiri sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Orang-orang fakir miskin dapat disebut juga sebagai orang yang mengalami kemiskinan, keadaan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan yang dialami individu, kelompok maupun keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum mereka. Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang tidak bekerja serta banyak juga warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>36</sup>

Menurut Emil Salim, mengartikan kemiskinan adalah suatu keadaan yang melukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi

---

<sup>36</sup>Muhidin Syarif, *Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.1.

kebutuhan hidup.<sup>37</sup> Istilah lain kemiskinan itu, merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan, serta kemelaratan.

Jalaluddin Rahmat mengemukakan bahwa memandang kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tetapi berasal dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri, bahwa orang miskin terjadi karena mereka tidak mau bekerja keras, boros, tidak memiliki rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta.<sup>38</sup>

Chamber dalam Nasikum mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi atau suatu konsep yang dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan, kemiskinan menurutnya memiliki lima dimensi yaitu: kemiskinan (*poverty*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.<sup>39</sup>

Bank Dunia berpendapat bahwa *"The case for human development is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves"*. Bank Dunia memiliki pandangan bahwa pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi

---

<sup>37</sup>Zainal Effendi, *Ilmu Alamiah Dadar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), h.132.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.3.

yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya.<sup>40</sup>

Menurut Supriatna suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.<sup>41</sup>

Berbagai definisi fakir miskin atau kemiskinan yang sudah disebutkan oleh beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa fakir miskin merupakan orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan guna untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sendiri maupun kebutuhan hidup keluarganya, dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan serta kurangnya perawatan kesehatan dan juga kurangnya pendidikan yang layak. Kemiskinan juga merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya dimasyarakat negara-negara berkembang seperti Indonesia ini.

#### b. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Hidup dalam suatu garis kemiskinan bukanlah hanya hidup dalam kekuarangan uang dan tingkat pendapatan yang sangat rendah, tetapi banyak juga hal lainnya, seperti: tingkat kesehatan yang menurun, tingkat

---

<sup>40</sup>Muhammad Noh, Suhartono Winoto, *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*, (Malang: UB Press, 2017), h.52.

<sup>41</sup>*Ibid.*

pendidikan yang rendah, tingkat perlakuan yang tidak adil dalam hukum, tingkat kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam melakukan jalan hidupnya sendiri.

Menurut Chambers dalam Nasikum, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:<sup>42</sup>

1) Kemiskinan Absolut

Disebut kemiskinan absolut bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minuman atau kebutuhan dasar pokok pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan bentuk ini dikarnakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3) Kemiskinan Kultural

Bentuk ini mengacu pada persoalan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar.

---

<sup>42</sup>Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.3-4.



#### 4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini merupakan situasi miskin yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan sering kali terbentur oleh perilaku kemiskinan kultural, karena mereka yang mengalami kemiskinan dalam bentuk ini mungkin sudah pasrah dan menerima keadaan apa adanya karena ketidakmauan mereka untuk lari dari kemiskinan. Kemiskinan struktural terjadi karena faktor-faktor perbuatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan golongan kelompok masyarakat tertentu.

#### c. Faktor Terjadinya Kemiskinan

Faktor terjadinya kemiskinan banyak ragamnya tergantung kepada kondisi demografisnya. Kemiskinan bersifat multidimensional, yang berarti tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja seperti ketiadaan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*), akan tetapi terkait dengan aspek-aspek yang lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa kemiskinan di suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor non ekonomi.

Kecendrungan penduduk miskin di suatu negara dikarenakan oleh ketergantungannya pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi

yang tradisional yang sering dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:<sup>43</sup>

*Pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karna adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam bentuk terbatas dan kualitas rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya pun rendah, yang pada gilirannya upahnya pun rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karna rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Selain dari faktor ekonomi, adapula faktor non ekonomi seperti aspek lain yang berperan dalam kemiskinan adalah aspek pendidikan. Keterampilan dan kemampuan berfikir seseorang akan bertambah dengan tingkat pendidikan tinggi. Hal ini tentunya akan meningkatkan produktivitas masyarakat kemudian peningkatan produktivitas akan berdampak pada

---

<sup>43</sup>Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV.Seribu Bintang), h.30.

pendapatan yang semakin besar sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian faktor non ekonomi dalam aspek pendidikan yaitu pendidikan, merupakan salah satu investasi pembangunan yang dapat dinikmati dikemudian hari. Adapula faktor non ekonomi dalam aspek kesehatan, tingkat kesehatan juga menjadi salah satu aspek yang berperan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia baik masyarakat kalangan atas, menengah maupun bawah.

Bank dunia juga menjelaskan penyebab kemiskinan antara lain kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan terbatas, perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktifitas, budaya hidup yang jelek, tata perintah yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.<sup>44</sup>

Faktor terjadinya kemiskinan dipedesaan dan diperkotaan pun berbeda-beda, menurut Sahdan penyebab utama kemiskinan dipedesaan yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Pengaruh faktor pendidikan yang rendah.
- 2) Ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian.
- 3) Ketidak merataan investasi disektor pertanian.
- 4) Alokasi anggaran kredit yang terbatas.
- 5) Ketersediaan bahan kebutuhan dasar yang terbatas.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h.28.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h.29.

- 6) Kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota).
- 7) Pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional.
- 8) Produktivitas dan pembentukan modal yang masih rendah.
- 9) Budaya menabung yang belum berkembang di kalangan masyarakat desa.
- 10) Tata pemerintah yang buruk (*bad governance*) yang secara umum yang masih berkembang di pedesaan.
- 11) Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa.
- 12) Jaminan kesehatan yang rendah.

Sedangkan faktor terjadinya kemiskinan di perkotaan, Tambunan menyatakan bahwa penyebab utama dari kemiskinan di perkotaan di Indonesia adalah kemiskinan atau ketinggalan ekonomi di pedesaan. Pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia kurang berkembang dibandingkan dengan pembangunan ekonomi di perkotaan. Ekonomi di perkotaan didominasi oleh sektor pertanian. Ketika lahan pertanian semakin banyak terkonversi untuk tujuan lain, maka hal ini mendorong peningkatan migrasi dari desa ke kota, namun mereka yang bermigrasi sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak karena kemiskinan di pedesaan umumnya memiliki faktor pendidikan yang rendah. .

Selain itu faktor-faktor kemiskinan yang mempengaruhi rumah tangga yaitu:<sup>46</sup> umur dan pendidikan anggota keluarga khususnya kepala keluarga, jumlah anggota keluarga yang mempunyai pekerjaan, komposisi

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, h.28.

dan besaran rumah tangga, asset yang dimiliki rumah tangga, akses pada jasa pelayanan sosial dasar, jenis kelamin kepala rumah tangga, peubah lokasi, dan sektor lapangan kerja.

Pada garis besarnya faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan yang paling utama adalah sebagai berikut:

#### 1) Pendidikan yang terlampau rendah

Adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan dalam masuk dunia kerja.

#### 2) Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karna masalah ini mencangkup kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, atau bersikap bersandar pada nasib. Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.<sup>47</sup>

#### 3) Keterbatasan sumber daya alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat atau individu apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka.

---

<sup>47</sup>Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.288.



#### 4) Terbatasnya lapangan pekerjaan

Terbatasnya lapangan pekerjaan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang yang mengatakan bahwa seseorang maupun masyarakat harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, tetapi secara fakta hal tersebut kecil kemungkinan, karna adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik berupa skill maupun modalnya.

#### 5) Keterbatasan modal

Keterbatasan modal merupakan sebuah kenyataan yang ada di negara-negara berkembang, kenyataan seperti ini membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat dinegara tersebut. Seseorang miskin sebab karna mereka tidak memiliki modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

#### 6) Tanggungan keluarga

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak meningkat pula tanggungan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi oleh usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karna mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h.289.

#### d. Indikator Kemiskinan

Selain itu kemiskinan juga memiliki indikator, dimana indikator itu sendiri berarti sesuatu yang dapat memberikan petunjuk ataupun keterangan. Indikator juga dapat disebut sebagai ciri-ciri untuk mengukur suatu kemiskinan, ada beberapa indikator yang dapat menjadi tolak ukur atau gambaran kepastian untuk menentukan atau mengkatagorikan penduduk miskin, terdapat 14 katagori sebagai indikator kemiskinan, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu berkualitas rendah.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari jenis bambu, kayu berkualitas rendah, atau dari tempok tidak diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas kamar mandi pribadi atau masih bersama-sama dengan tetangga yang lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi seperti dari sungai dan air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang atau minyak tanah.
- 8) Hanya mengonsumsi daging, susu, ayam dalam seminggu sekali.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sekali atau dua kali dalam sehari.

---

<sup>49</sup>Suriani, Diana Sapta, Cut Zazkia, *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), h.12.

- 11) Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dalam luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan.
- 13) Pendidikan tinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- 14) Tidak memiliki barang atau tabungan yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, atau barang modal lainnya.

Sedangkan menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadikan indikator utama kemiskinan yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Kecukupan dan mutu pangan yang terbatas.
- 2) Mutu dan akses layanan kesehatan yang terbatas.
- 3) Akses dan mutu layanan pendidikan rendah dan terbatas.
- 4) Kesempatan kerja dan berusaha terbatas.
- 5) Perlindungan terhadap asset usaha rendah dan perbedaan upah.
- 6) Akses layanan perumahan terbatas.
- 7) Akses terhadap air bersih terbatas.
- 8) Kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah yang lemah.
- 9) Kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam memburuk, serta akses masyarakat terhadap sumber daya alam terbatas.
- 10) Jaminan rasa aman rendah.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

- 11) Partisipasi rendah.
- 12) Beban kependudukan tinggi yang disebabkan oleh tanggungan keluarga yang besar, dan
- 13) Tata kelola pemerintah yang buruk yang menyebabkan keborosan dalam pelayanan publik, korupsi dan jaminan sosial terhadap masyarakat rendah.

Indikator kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, posisi manusia dalam lingkungan sekitar, dan kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara layak.

Kemiskinan terhadap persepsi manusia secara kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat, dan sistem nilai yang dimiliki. Dalam hal ini garis kemiskinan dapat tinggi atau rendah, terhadap posisi manusia dalam lingkungan sosial, bukan ukuran kebutuhan pokok yang menentukan melainkan bagaimana posisi pendapatannya ditengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara layak ditentukan oleh komposisi pangan apakah bernilai gizi cukup dengan nilai protein dan kalori cukup sesuai dengan tingkat umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan keadaan lingkungan yang dialaminya. Semuanya dapat disimpulkan dalam barang dan jasa serta tertuangkan dalam nilai uang sebagai patokan bagi pendapatan minimal yang

diperlukan, sehingga garis kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan minimum.

Sajogyo seorang pakar ilmu sosiologi dan ekonomi mengusulkan untuk mengukur kemiskinan dengan pendekatan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak.<sup>51</sup> Cara yang dikembangkan adalah dengan cara menghitung standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang yang disebut miskin yaitu, *pertama* golongan paling miskin dan mempunyai pendapatan perkapita pertahun beras sebanyak 240 kilogram atau kurang, *kedua* golongan miskin sekali yang mendapatkan pendapatan perkapita pertahun beras sebanyak 240 kilogram sampai 360 kilogram, dan yang *ketiga* adalah golongan miskin yang memiliki pendapatan beras perkapita pertahun lebih dari 360 kilogram tetapi kurang dari 480 kilogram.<sup>52</sup>

#### e. Hak dan Tanggung Jawab Fakir Miskin

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Seorang fakir miskin juga mempunyai hak-hak dalam keberlangsungan hidupnya yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

##### 1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan

---

<sup>51</sup>Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV.Seribu Bintang), h.34.

<sup>52</sup>Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial*, (Bandung: Nuasa Cendikia, 2019), h.121.

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 3.

- 2) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
- 4) Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter budayanya
- 5) Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya
- 6) Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- 7) Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- 8) Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan
- 9) Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Selain hak-hak diatas fakir miskin juga memiliki tanggung jawab diantaranya adalah:<sup>54</sup>

- 1) Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya
- 2) Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat
- 3) Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan, dan
- 4) Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 4.



f. Penanganan Fakir Miskin

Melakukan penanganan terhadap fakir miskin dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah dan tidak kalah penting dapat dilakukan oleh masyarakat juga. Penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk:<sup>55</sup>

- 1) Pengembangan potensi diri, yang dimaksud dengan pengembangan potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam didalam dirinya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia<sup>56</sup>, dan merupakan upaya untuk mengasah kemampuan seseorang dalam mengembangkan potensi diri baik secara mental, spiritual, maupun budaya.
- 2) Bantuan pangan dan sandang, pangan sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman oleh konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makan dan minum. Sedangkan sandang adalah pakaian yang diperlukan. Jadi bantuan pangan dan sandang yang dimaksud yaitu bantuan untuk meningkatkan kecukupan kebutuhan sehari-hari baik makanan, minuman serta pakaian yang layak bagi orang-orang fakir miskin.

---

<sup>55</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 7 ayat (1).

<sup>56</sup>Selamet Wiyono, *Manajemen Potensi Diri*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h.37.

- 3) Penyediaan pelayanan perumahan, perumahan merupakan sekelompok rumah atau bangunan yang dibangun secara bersamaan dan berfungsi sebagai tempat tinggal. Penyediaan pelayanan perumahan ini guna untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan atau tempat tinggal yang layak dan juga sehat.
- 4) Penyediaan pelayanan kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>57</sup> Jadi yang dimaksud penyediaan pelayanan kesehatan merupakan penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
- 5) Penyediaan pelayanan pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung disekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.<sup>58</sup> Jadi maksud dari penyediaan pelayanan pendidikan ialah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender atau tanpa pembeda antara laki-laki dan perempuan.
- 6) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, kesempatan kerja ialah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>58</sup>Armos Neolaka, Grace Amalia, *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Cimanggis: Kencana, 2017), h.2.

pekerjaan.<sup>59</sup> Sedangkan berusaha yaitu melakukan suatu kegiatan usaha dibidang perdagangan. Jadi penyediaan akses kesempatan kerja merupakan suatu tindakan pemerintah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak agar mereka dapat menghasilkan suatu pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya.

- 7) Bantuan hukum, bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang bermasalah dan tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>60</sup> Pelayanan sosial, pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan fungsi sosialnya.

Melakukan penanganan fakir miskin harus melalui: pemberdayaan kelembagaan masyarakat upaya membuat penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin. Upaya peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui kelompok usaha bersama. Jaminan dan perlindungan sosial dalam upaya ini memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik. Kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Serta koordinasi antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

---

<sup>59</sup> Alam S, *Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.3.

<sup>60</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Pranadamedia Group, 2019), h.23.

Pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap fakir miskin harus berasaskan kepada:<sup>61</sup>

- 1) Kemanusiaan, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara seimbang.
- 2) Keadilan sosial, yang dimaksud dengan asas keadilan sosial adalah penanganan fakir miskin memberikan keadilan secara seimbang bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- 3) Nondiskriminasi, yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi ini adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.
- 4) Kesejahteraan, maksud dalam asas ini ialah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi fakir miskin.
- 5) Kesetiakawanan, dalam asas kesetiakawanan menjelaskan bahwa dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan rasa empati dan kasih sayang.
- 6) Pemberdayaan, yang dimaksud asas pemberdayaan yaitu penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

---

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 2.

Selain bentuk dan asas mengenai penanganan fakir miskin, pemerintah juga melakukan pendekatan wilayah dalam melakukan penanganan fakir miskin ini. Pendekatan wilayah ini diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal yang meliputi:<sup>62</sup>

- 1) Wilayah perdesaan, upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan melalui penyediaan sumber mata pencarian dibidang pertanian, peternakan dan kerajinan. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa. Serta pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.
- 2) Wilayah perkotaan, upaya penanganan dalam hal ini melalui penyediaan sumber mata pencarian dibidang usaha sector informal. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha. Pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat dan peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- 3) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanganan pada wilayah ini melalui penyediaan sumber mata pencarian dibidang perikanan dan sumber daya laut. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan. Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

---

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 21-25

- 4) Wilayah tertinggal atau terpencil, upaya penanganannya yaitu pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Penyediaan sumber mata pencarian dan bantuan permodalan serta akses pemasaran dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan. Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan serta pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.
- 5) Wilayah perbatasan antar negara, upaya ini dilakukan dengan cara penyediaan sumber mata pencarian dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil dari pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya. Menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber dayalokal dan peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

Selain itu penanganan fakir miskin dapat dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan sosial. Amarta Sein mengartikan pendekatan kesejahteraan sosial sebagai kesejahteraan yang berasal dari kemampuan untuk berfungsi dalam masyarakat.<sup>63</sup> Dengan demikian, kemiskinan muncul ketika seseorang tidak memiliki kemampuan kunci, dan juga tidak memperoleh pendapatan atau pendidikan yang memadai atau kesehatan

---

<sup>63</sup>Rustanto Bambang, *Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*, (Bandung: STKS Press, 2010), h.12.



yang buruk, kurang percaya diri, merasa tidak berdaya serta tidak ada kebebasan untuk berbicara. Dari pengertian tersebut Homan menjelaskan tiga pendekatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial di antaranya melalui pendekatan *residual*, *institusional*, dan *development* berikut adalah penjelasannya:<sup>64</sup>

- 1) Pendekatan *Residual*, pendekatan ini adalah suatu pendekatan kesejahteraan sosial yang menyediakan jaringan pengaman sosial kepada individu dan keluarga sebagai pelayanan tambahan untuk membantu individu-individu yang mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi.
- 2) Pendekatan *Institusional*, pendekatan ini adalah suatu pendekatan kesejahteraan sosial yang merespon untuk saling berbagi dalam kondisi sosial.
- 3) Pendekatan *Development*, pendekatan ini adalah suatu pendekatan kesejahteraan sosial yang berupaya membuat hidup lebih baik dengan meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi indeks pembangunan manusia, tetapi belum tentu mampu menangani permasalahan dan membantu mereka yang dalam kesusahan. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan peluang kepada masyarakat membentuk lembaga kesejahteraan sosial yang membuat hidup menjadi lebih baik, berupaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia.

---

<sup>64</sup>Rukmanto Adi, Isbandi, *Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2002), h.14.

## 2. Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang mencakup dalam wilayah kajian hukum dalam islam, secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan *syari'ah* atau *syara'*.<sup>65</sup> Adapun lafaz *syari'ah* atau *syara'* itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti *sunnah* atau dalam bahasa Indonesia berarti jalan.<sup>66</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah *syari'ah* berarti ketetapan hukum yang disyariatkan Allah berupa jalan yang harus dilalui hambanya. Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah *syari'ah* itu merupakan sejumlah ketetapan hukum yang baik secara langsung ataupun tidak langsung bersumber dari Allah yang harus diikuti.

Seorang intelektual muslim Pakistan bernama Ahmad Hasan mendefinisikan syariah dengan istilah yang digunakan dalam bahasa hukum sebagai jalan kesalehan yang dikaruniakan dalam langit (istilah langit dipahami yang maha tinggi). Dengan demikian Bunyana Sholihim menegaskan bahwa *Syari'ah* itu berarti segala ketentuan Allah mengenai segala perbuatan hamba yang harus dijalani, diikuti, dipenuhi, dan di taati serta mempunyai saksi hukum bagi siapa saja yang menyalahinya.

---

<sup>65</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018), h.9.

<sup>66</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h.13.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung maupun ketetapan yang tidak langsung.<sup>67</sup> Hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagai disiplin ilmu yang lainnya.

#### b. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum yang dimaksud adalah suatu tempat awal dari mana atau dimana didapatkannya ketentuan atau ketetapan hukum itu sendiri berasal. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Wahyu (Naql), sumber wahyu adalah sumber hukum yang berupa wahyu, baik itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. melalui perantara malaikat Jibril maupun wahyu yang langsung dipahami oleh Rasulullah dalam bentuk sunnah.<sup>68</sup> Sumber wahyu yang dimaksud sering juga disebut sebagai sumber Naqli yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Secara istilah Al-Qur'an adalah firman Allah SWT berupa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. dalam ungkapan bahasa Arab dan disampaikan kepada seluruh umatnya secara mutawatir dalam bentuk mushhaf yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas sebagai penjelasan menyangkut kemashlahatan hidup manusia, baik kemashlatan mereka didunia ini ataupun diakhirat kelak.

---

<sup>67</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan...*, h.11.

<sup>68</sup>*Ibid.*, h.14.

2) Rasio (Akal), adalah proses kerja ratio atau akal manusia yang mampu memahami dan menganalisa tekstual wahyu dan realita fenomenal.<sup>69</sup> Sumber ratio dalam ungkapan bahasa hukum Islam sering juga disebut '*Aql*. Sehingga sumber rasio sebagai hukum Islam terdiri dari: *Ijma*' dan *Ijtihad*. *Ijma*' merupakan niat atau kehendak untuk sesuatu, apabila mereka sepakat hal yang demikian itu berdasarkan ini maka kesepakatan setiap kelompok atas satu dari sejumlah perkara, baik menyangkut urusan dunia maupun agama.<sup>70</sup> Kemudian *Ijtihad* yaitu upaya pengendalian hukum masalah berlandaskan *Dalil Aqli* (akal).<sup>71</sup>

c. Tujuan Hukum dalam Islam

Tujuan hukum adalah suatu target tertentu yang hendak dicapai dan diwujudkan dengan ketentuan hukum. Dalam Islam hukum ditetapkan tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik untuk kemaslahatan hidup didunia ini maupun diakhirat nanti. Oleh karna itu tujuan hukum dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hamba, baik sejara individu ataupun tidak.<sup>72</sup> Jadi terwujudnya kemaslahatan hamba inilah yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh adanya ketetapan hukum dalam Islam.

Selain itu, hukum Islam juga bertujuan menegakkan keadilan dikalangan masyarakat. Keadilan harus tegak mulai dari peradilan sampai pada muamalah (hubungan antar manusia). Ajaran Islam juga menegaskan

---

<sup>69</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan...*, h.14.

<sup>70</sup>*Ibid.*, h.15.

<sup>71</sup>*Ibid.*, h.19.

<sup>72</sup>*Ibid.*, h.28.

permasalahan manusia dimuka hukum, tanpa memandang kekayaan, pangkat, ras, golongan, kelas, dan sebagainya. Di dalam Islam tujuan hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *maqasid al-syari'ah*. Secara etimologi, *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun kata *al-syari'ah* dalam kamus Munawir diartikan sebagai peraturan-peraturan, undang-undang, hukum.<sup>73</sup>

Bahwa secara umum tujuan hukum Islam yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudhorat ialah yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia.<sup>74</sup> Dengan kata lain, hukum Islam itu bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmami individu dan sosial. Kemaslahatan (kebahagiaan hidup) di sini tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 (lima) hukum Islam yaitu sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan, dan

---

<sup>73</sup>Akmal Basromi, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, (Jakarta: Kecana, 2020), h.214.

<sup>74</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan...*, h.28.

<sup>75</sup>Akmal Basromi, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan...*, h.15.

### 5) Memelihara harta

Berdasarkan rumusan Abu Ishaq al-Shatibi tentang tujuan hukum Islam disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari 2 segi, yaitu:

1) Ketika dilihat dari segi pembuatan hukum Islam itu sendiri, yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya tujuan hukum Islam adalah:

- a) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat *Primer/Daruriyyat*, adalah kebutuhan pertama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. *Sekunder/ Tahsiniyyat*, adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya yang primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.
- b) Untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari ushul fiqh atau pemahaman tentang syariah.
- c) Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

2) Sedangkan dilihat dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak atau mencegah yang tidak bermanfaat sama sekali bagi kehidupan. Kepentingan hidup yang disebut dengan



membawa dampak positif dan manfaat merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam, yaitu:<sup>76</sup>

a) Pemeliharaan atas agama

Pemeliharaan atas agama merupakan tujuan pertama dalam hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan dalam agama Islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam berhubungan dengan sang pencipta maupun berhubungan dengan sesama manusia lainnya.

b) Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal sangat penting mengingat dalam hukum Islam dengan menggunakan akal manusia akan dapat berfikir tentang Allah SWT, alam semesta, dan dirinya sendiri.

c) Pemeliharaan atas jiwa

Pemeliharaan atas jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang wajib pula, yaitu wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

d) Pemeliharaan atas keturunan

Pemeliharaan atas keturunan ini agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan untuk manusia dapat diteruskan, tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.

---

<sup>76</sup>Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h.17-20.

e) Pemeliharaan atas harta

Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia baik individu ataupun kelompok agar manusia itu dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu hukum Islam melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *maslahah*. *Maslahah* secara terminologi banyak dikemukakan oleh beberapa pakar metodologi hukum Islam, antara lain: Menurut Imam Al-Ghozali *maslahat* merupakan sesuatu yang mendatangkan keuntungan (manfaat) dan menjauhkan kerusakan, Sedangkan hakekat yang dimaksud adalah menjaga ketetapan hukum agar senantiasa sejalan dengan tujuan syara', bukan mengikuti apa yang dijadikan tujuan kebaikan oleh manusia.<sup>77</sup> Pengertian *maslahah* menurut Izzudin Ibnu Abdil Aziz Ibnu Abdus Salam menyatakan bahwa *maslahah* meliputi semua kebaikan dan manfaat, baik bersifat hakiki, yaitu kesenangan dan kenikmatan atau berbentuk majazi (sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan).<sup>78</sup>

Secara etimologi *maslahah* berasal dari kata tunggal Al-Mashalih sama artinya dengan Al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat ataupun untuk menolak kemudharatan maka hal itu disebut *maslahah*.

---

<sup>77</sup>Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2017), h.39.

<sup>78</sup>*Ibid.*

Adapun macam-macam *masalah* yaitu:<sup>79</sup> Pertama, *masalah mu'tabarah* yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Kedua, *masalah mulgah* yaitu setiap *masalah* yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi *masalah* itu diabaikan atau dibatalkan oleh syariat karena di dalam peristiwa itu terdapat mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Ketiga, *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang timbul setelah Nabi SAW wafat atau kemaslahatan yang muncul dalam benak pikiran manusia sepeninggalan nabi, dan *masalah* tersebut diakui dan tidak berlawanan dengan syariat.

Unsur atau hakikat *masalah mursalah* yaitu terdiri atas:<sup>80</sup> *Pertama*, kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindari keburukan (kemudorotan) bagi manusia. *Kedua*, sesuatu yang dinilai sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*Maqassid Al-Syariah*).

#### d. Arti Fakir Miskin dalam Islam

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan al-Bahri, Ibnu Zaid dan dipilih oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, orang fakir adalah orang yang tidak mampu, tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain.

<sup>79</sup>Satria Efendi dan Zein, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.136.

<sup>80</sup>Mohammad Rusfi, "Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal *Al Adalah*, Vol. XXI, No. 1, UIN Raden Intan Lampung, 1 Juni 2014), h.78.

Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak mampu dan selalu berkeliling untuk meminta-minta kepada orang lain.

Menurut Qatadah, orang fakir merupakan orang yang tidak mampu karena memiliki penyakit atau cacat fisik. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak mampu tetapi memiliki fisik yang lengkap dan sehat.<sup>81</sup>

Wahbah al-Zuhayli, tokoh fikih dari siria mengatakan bahwa golongan fakir itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ialah orang yang tidak memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan primernya sehari-hari dan tidak pula memiliki usaha yang dapat menghasilkan kebutuhan layak, tidak punya anak, isteri, orang tua yang menafkahnya sehingga tidak ada rumah yang layak, makanan yang cukup dan pakaian yang sederhana. Sedangkan orang miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengelolanya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimalnya, sehingga tidak tinggal di rumah layak huni, makan yang sehat, dan sandang yang memadai sesuai dengan perubahan iklimnya .

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan halal yang layak bagi dirinya yang mampu menutupi separuh kebutuhannya baik kebutuhan pangan, pakaian, rumah, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bias

---

<sup>81</sup>Abdul Wahid dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer* (Depok: Gema Insani, 2020), h.114.

digunakan untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan dirinya dan orang yang wajib dinafkahi oleh dirinya akan tetapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya.<sup>82</sup>

Fakir dan miskin dua kata yang berbeda makna Al-Sa'dly mengutip surah At-Taubah yang menjelaskan bahwa fakir miskin merupakan kata yang berdiri sendiri-sendiri, terkadang bisa bermakna fakir dan terkadang bisa bermakna miskin, tetapi apabila disebutkan secara bersamaan, maka fakir miskin dikatakan lebih rendah daripada miskin.<sup>83</sup>

Adapun perbedaan pendapat seputar sebutan orang yang tidak mempunyai apa-apa dengan kata *al-miskin* telah menyebabkan munculnya perdebatan antara fakir dan miskin. Ibnu berpendapat orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai apa-apa, adapun orang fakir adalah orang yang memiliki kehidupan pas-pasan.

Al-Ashmu'i berkata orang miskin itu lebih baik keadaannya dari pada orang fakir. Berikut adalah makna yang benar, dari ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang kata fakir dan miskin:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ ... ﴿٧٩﴾

Artinya: "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin..." (QS. Al-Kahfi:79).<sup>84</sup>

<sup>82</sup>Qodariah Barkah DKK, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h.102.

<sup>83</sup>Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2009), h.3.

<sup>84</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan, Al-Kahfi 79*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006),

Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya dari pada orang fakir dikarenakan mereka memiliki bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Artinya meski mereka miskin namun mereka masih punya sesuatu hal yang bisa dikerjakan, masih punya penghasilan dan pemasukan, meski tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan pokoknya.

Beberapa penjelasan di atas dapat dipahami kembali bahwa orang-orang miskin merupakan orang yang membutuhkan, berbadan sehat, bekerja, memiliki pendapatan serta tidak meminta-minta. Sedangkan fakir yaitu orang yang membutuhkan, berpenyakit sehingga bisa menyebabkan dia tidak dapat bekerja serta tidak memiliki pendapatan lalu akhirnya meminta-minta di jalan. Namun perbedaan makna dari fakir dan miskin hanya terjadi jika kedua kata tersebut disebutkan didalam satu kalimat. Dan jika dipisah, misalkan fakir saja dalam suatu kalimat maka orang miskin sudah masuk kedalam maknanya sesuai.

#### e. Prinsip Pemberdayaan Fakir Miskin

Kaum fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Menghadapi persoalan sosial yang akut ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir



dan miskin yaitu:<sup>85</sup> pertama prinsip *ta'awun*, yakni prinsip kerjasama dan sinergi diantara berbagai pihak yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma’idah: 2).<sup>86</sup>

Penanggulangan kemiskinan bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya, namun penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak-pihak terkait. Dengan berbagai keterbatasan, baik aspek manajemen, organisasi maupun aspek keuangan, pemerintah tidak akan mampu menjadi pemain tunggal. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum lintas pelaku karena itu kerjasama dan sinergi dalam pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin mutlak diperlukan. Bentuk *ta'awun* ini meliputi kelembagaan, manajemen,

<sup>85</sup>Suriani, Diana Sapta, *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi: Analisis Beras Miskin (Raskin) di Provinsi Aceh*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), h.37.

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *Al-Ma’idah 2*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi kemiskinan.

Kedua, prinsip *syura* yaitu prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan kesinambungan. Prinsip *syura* ini terutama terkait dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang ditempuh Al-Qur'an dalam menetas kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin.

Sebab penanggulangan kemiskinan tanpa *social capital* di atas akan rapuh jika dilakukan tanpa berpegangan pada prinsip *syura*. Karna prinsip *syura* ini berarti pengakuan atau penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan menggunakan mekanisme *syura* berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan kaum fakir dan kaum miskin.<sup>87</sup>

Al-Qur'an memandang bahwa suatu kemiskinan adalah masalah sosial harus ditangani. Disatu sisi Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Seseorang yang memperoleh harta secara sah, dia berkuasa penuh atas harta tersebut. Islam mengakui perbedaan

---

<sup>87</sup>Dede Rodin, Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Prespektif Al-Qur'an, *Jurnal Walisongo*, Volume VI Edisi 1, Mei 2015.

dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar sesuai dengan perbedaan keahlian dan kemampuan setiap orang serta sebagai pendorong seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Hanya saja perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkendali. Perbedaan yang mendorong semangat kerja dan produktivitas, melahirkan keharmonisan dan saling melengkapi.

Islam juga menuntut adanya distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang. Islam berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam disbanding dengan kebutuhan manusia.<sup>88</sup> Permasalahan persoalan tentang bagaimana membebaskan kaum fakir miskin dari kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kehidupan ekonomi mereka berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta, maka upaya pembebasan dan pemberdayaan fakir miskin terlebih dahulu harus melihat bagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an.

#### f. Penanganan Fakir Miskin dalam Islam

Penanganan fakir miskin secara garis besar terdapat dua ketentuan, pertama berupa perintah dan juga anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini ada beberapa model dan langkah

---

<sup>88</sup>Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.137.

yang ditempuh Al-Qur'an dalam penanganan fakir miskin, yaitu sebagai berikut.<sup>89</sup>

#### 1) Perintah Bekerja

Kaum fakir miskin sebenarnya memiliki daya dan kemampuan untuk bangkit dari kemiskinannya. Mereka mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapinya, akan tetapi mereka selama ini belum menyadari akan kemampuannya. Bekerja adalah senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Bekerja menjadi penyebab utama penghasilan harta atau benda dan unsur utama pula dalam upaya memakmurkan diri. Dalam naungan dan sistem peraturan Islam, tidak ada seorang pekerja pun yang tidak mendapatkan upah dari hasil jerih payah dan keringatnya. Perintah bekerja ini terkait dengan kedudukan dan tujuan manusia di bumi ini yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah manusia bertugas mengabdikan (beribadah kepada Allah) baik ibadah khusus yaitu sholat, puasa, zakat dan haji adapula ibadah umum yaitu segala bentuk amal shaleh yang aturan dan tata caranya tidak ditentukan secara khusus oleh agama. Semua aktifitas dan kegiatan manusia dalam bidang apapun termaksud bekerja, sejatinya dilakukan dalam rangka mengabdikan dan ibadah kepadanya. Allah SWT tidak akan pernah merubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri, untuk

---

<sup>89</sup>Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an", (Jurnal *Ekonomi Islam* Vol VI/edisi/1, Mei 2020).

kelanjutan hidup di dunia manusia diperintahkan bekerja sesuai dengan keahliannya agar mendapat hasil yang maksimal. Seperti firman Allah yang berbunyi:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلْتُ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “*Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.*” (QS. Az-Zumar: 39)<sup>90</sup>

## 2) Perintah Memberi Makan

Islam mendorong kita agar menjadi umat yang peduli dan berbagi kepada kaum yang membutuhkan, dengan memberikan pertolongan pertama kepada mereka dalam bentuk perintah memberikan makanan kepada orang miskin guna menjaga kelangsungan hidup mereka. Dalam Al-Qur'an memberikan makanan kepada orang miskin dihubungkan dengan kewajiban membayar fidyah.

Secara bahasa fidyah berarti memberikan harta untuk menebus seseorang.<sup>91</sup> Kewajiban fidyah bisa ditunjukkan kepada mereka yang tidak sanggup berpuasa dan tidak memiliki kemampuan untuk mengqadhanya di luar Ramadhan, seperti orang yang lanjut usia, orang yang sakit berat, wanita yang hamil dan menyusui.

<sup>90</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *Az-Zumar ayat 39*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

<sup>91</sup>Syaikh Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015) h.583.

Selain terkait dengan membayar fidyah, memberi makan juga terkait dengan khafa'rah, seperti khafa'rah melanggar sumpah, kafarah pelanggaran atas salah satu kewajiban haji, dan sebagainya. Perintah memberikan makanan kepada orang miskin dengan bentuk fidyah maupun kafarah, selain sebagai bentuk pertolongan pertama kepada mereka guna menjaga kelangsungan hidup mereka, juga dapat dipahami sebagai cara Islam dalam penanganan fakir miskin.

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ  
الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

Artinya: “(41) tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, (42) Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? (43) mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat (44) dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin”. (QS. Muddassir: 41-44).<sup>92</sup>

Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang yang menyebabkan mereka masuk neraka saqar, diantaranya adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin.

Perintah memberi makan juga menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, peran pemerintah sangat menentukan guna untuk mensejahterakan kaum miskin. Berjalannya program-program bantuan sosial seperti bantuan sembako disetiap

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *Al-Muddasir 41-44*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).



bulannya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

### 3) Perintah Bersedekah

Perintah bersedekah (membelanjakan harta) menjadi fungsi dan tujuan utama kepemilikan harta dan modal. Dan infakkan (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karna sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”* (QS. Az-Zariyat: 19)<sup>93</sup>

Pada dasarnya orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain (orang yang tertimpa musibah).

---

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *Az-Zariat: 19*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

#### 4) Perintah mengeluarkan zakat

Zakat merupakan salah satu potensi terbaik upaya penanganan kemiskinan dan pemberdayaan kemiskinan. Zakat bukanlah amal baik individu atau sumbangan sukarela tetapi zakat merupakan hak dan kewajiban. Zakat adalah sebuah system yang diciptakan Allah untuk hambanya dalam upaya memberikan jaminan sosial masyarakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS An Nur: 56)<sup>94</sup>

#### 5) Larangan monopoli (*ihtikar*) dan menimbun harta (*ikhtinaz*)

Secara bahasa monopoli berasal dari bahasa Arab, monopoli disebut dengan *ihtikar* yang berarti menimbun dan menahan makanan atau kebutuhan pokok karena menunggu harga tinggi. Sedangkan *ikhtinaz* dapat diartikan dengan menahan harta (dana), menahannya, menjauhkan dari peredaran dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Baik *ihtikar* maupun *ikhtinaz* keduanya termaksud memperoleh harta secara batil dan tindakan aniaya sekelompok orang (orang kaya) terhadap kelompok lain (orang miskin). Bahayanya yang ditimbulkan oleh penimbun harta akan mempengaruhi perekonomian karna sekiranya uang, harta atau barang tidak disimpan dan tidak

<sup>94</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *An-Nur 56*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

ditahan, tentu ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya menjadi modal dalam membuat usaha yang baru.<sup>95</sup>

... وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dzalim. Niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.” (QS. Al-Haj: 25)<sup>96</sup>

Tentang beberapa uraian mengenai cara penanganan fakir miskin diatas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: langkah-langkah yang bersifat structural dan yang bersifat kultural. Langkah structural lebih ditekankan kepada lembaga khusus yang menanganinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan kepada individu, baik individu yang diharapkan menjadi salah satu subjek penanganan fakir miskin maupun yang menjadi objeknya. Perintah mengeluarkan zakat, memberi makan dan larangan monopoli (*ihtikar*) dan menimbun harta (*ikhtinaz*) termaksud kelompok structural. Sedangkan perintah bekerja dan berinfaq termaksud kelompok kultural. Bekerja ditekankan kepada kaum miskin, sedangkan infak ditekankan oleh kaum kaya. Pada langkah structural maupun kultural, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.

<sup>95</sup>Ahmad Muhammad, Fathi Ahmad, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.100-101.

<sup>96</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *Al-Haj :25* , (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

Langkah struktural yang menangani yaitu lembaga pemerintahan. Aspek pemerintah bukan merupakan sarana utama, namun peran pemerintah sangat menentukan baik dalam membuat masyarakat mejadi keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Beberapa kebijakan yang mampu diharapkan dapat mengetaskan kemiskinan sudah dapat diupayakan seperti yang dijalankan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial berupa sembako. Pengetasan kemiskinan baik pemerintah maupun masyarakat secara personal harus menggerakan segala kemampuan, berusaha memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Menghilangkan kemiskinan secara tuntas tentu sangatlah tidak mungkin karena itu merupakan takdir Allah dan kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering terjadi, namun dapat diberantas dan ditanggulangi dengan membantu secara langsung orang-orang miskin. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita untuk saling melakukan tolong menolong dalam kebaikan.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Penulis menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada

tinjauan pustaka ini penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul penelitian ini. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

Adapun dalam tinjauan ini dalam bentuk karya ilmiah berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya sebagai berikut:

Nurul Huda<sup>97</sup>, skripsi mahasiswa Universitas Jember fakultas hukum, dalam penelitian skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Di Kabupaten Bondowoso)” penelitian ini merujuk pada pendekatan masalah undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan (*conseptual approach*), tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi kewenanganpemerintah daerah kabupaten Bondowoso dalam penanganan kemiskinan dan kendala dalam penanganan kemiskinan tersebut dan kebijakan apa yang telah dilaksanakan.

---

<sup>97</sup>Nurul Huda, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Di Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember: 2013, h.xii.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah program kegiatan pengetasan kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Sosial serta dinas-dinas terkait adalah program keluarga harapan, faktor yang mendukung sosialisasi program keluarga harapan adalah adanya dukungan pemerintah dan adanya instansi pemerintah yang lain yang bisa diajak bekerja sama dalam mensosialisasikan program keluarga harapan, sedangkan faktor penghambat dari program ini adalah kurangnya pemahaman rumah tangga sangat miskin tentang pentingnya program ini bagi mereka hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat pengetahuannya masih rendah.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda yakni sama-sama meneliti tentang penanganan fakir miskin yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin. Perbedaanya terletak pada masalah yang akan diteliti, peneliti menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sedangkan dalam penelitian Nurul Huda meneliti implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo serta kebijakan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan penanganan fakir miskin. Peneliti menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.



Siti Abidah Lubis<sup>98</sup>, mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sumatera Utara dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data lapangan dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial, hambatan, serta solusi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Hasil dari penelitian ini adalah kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui PKH di Desa Sidiangkat sudah berjalan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial kepada masyarakat miskin, adapun hambatan yang dilalui yaitu pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala dalam pemberian bantuan PKH serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PKH.

---

<sup>98</sup>Siti Abidah Lubis, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*, Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Medan: 2019, h.iv.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Abidah Lubis adalah sama-sama membahas tentang penerapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu mencari hambatan serta solusi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan, sedangkan peneliti menganalisis implementasi undang-undang tentang penanganan fakir miskin. Peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam tetapi peneliti menggunakan hukum Islam.

T. Mulya Maulinda<sup>99</sup>, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Syiah Kuala dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)” penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sumber observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi dan faktor penghambat yang dialami pemerintah Banda Aceh dalam mengimplementasikan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di Kota Banda Aceh.

Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan penanganan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sedangkan faktor

---

<sup>99</sup>T.Mulya Maulinda, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Aceh: 2019, h.6.

yang menjadi kendala adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat Banda Aceh baik yang mejadi objek kebijakan maupun masyarakat umum.

Adapun persamaan peneliti dengan peneltian yang dilakukan oleh T.Mulya Maulinda adalah sama-sama membahas tentang fakir miskin. Perbedaannya penelitian penulis membahas tentang implementasi undang-undang tentang penanganan fakir miskin sedangkan penelitian terdahulu mencari strategi dan faktor penghambat yang dilakukan pemerintah Banda Aceh dalam mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Penulis menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

Berdasarkan dari beberapa tinjauan pustaka diatas yang mengkaji dan membahas tentang pen anganan fakir miskin, pembahasan yang telah disebutkan tersebut tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru terkait dengan penanganan fakir miskin. Fokus dari pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam prespektif hukum Islam studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

### **Buku-Buku:**

Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Abdul Wahid dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Depok: Gema Insani, 2020.

Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial*, Bandung: Nuasa Cendikia, 2019.

Ahmad Muhammad, Fathi Ahmad, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Akmal Basromi, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebenaran Hukum Tuhan*, Jakarta: Kencana, 2020.

Alam S, *Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Amir Syaripudi, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

AmiruddindandH.ZainalAsikin, *PengantarMetodePenelitianHukum*, cet.1, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.

Andri Soemitra, *Edisi Kedua Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009.

Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Armos Neolaka, Grace Amalia, *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, Cimanggis: Kencana, 2017.

Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2010.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018.

- Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* Cet Ke-1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Cv Andi Ofside, 2010.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, Malang: CV. Seribu Bintang.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara, Studi Konsep dan Metodologi*, Jakarta: Duta Media Publishing, 2017.
- Muhammad Noh, Suhartono Winoto, *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*, Malang: UB Press, 2017.
- Muhidin Syarif, *Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Qodariah Barkah DKK, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rukmanto Adi, Isbandi, *Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2002.

- Rustanto Bambang, *Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*, Bandung: STKS Press, 2010.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- SatriaEfendidanZein, *UshulFiqh Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Selamet Wiyono, *Manajemen Potensi Diri*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sri Murtono, Hassan Suryono, Martiyo, *Pendidikan Keluarganegaraan*, Jakarta: Yudistira, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Suriani, Diana Sapta, *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi: Analisis Beras Miskin (Raskin) di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- SyahrulMustofa, *Yudisialisasi Politik, Pertempuran dan Penggeseran Kekuasaan Politik dan Hukum Dalam Judicial Review*, Mataram: Guepedia, 2014.
- Syaikh Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Pranadamedia Group, 2019.
- Zainal Effendi, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar*, Malang: Inteligensia Media, 2020.

#### **Jurnal dan Skripsi:**

- Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Prespektif Al-Qur'an", *Jurnal Ekonomi Islam Vol VI/edisi/1*, Mei 2020.
- Mohammad Rusfi, "Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al Adalah, Vol. XXI, No. 1, UIN Raden Intan Lampung*, 1 Juni 2014.
- Nurul Huda, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang*



*Penanganan Fakir Miskin (Studi Di Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember: 2013.

SitiAbidahLubis, *Peran DinasSosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulagi Kemiskinan Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*, Skripsi Program StudiPengembanganMasyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Medan: 2019.

T.MulyaMaulinda, *ImplementasiPasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar DipeliharaOleh Negara (StudiPadaPemerintah Kota Banda Aceh)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Aceh: 2019.

#### **Perundang-Undangan:**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2018 Tentang Program KeluargaHarapan.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Undang-UndangNomor 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin.

Undang-UndangNomor 23 Tahun 1992 tentangKesehatan.

#### **SumberWawancara:**

Elvira Yusna, Wawancara dengan Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial DinasSosial Kota Bandar Lampung, 14 dan 17 September 2020.

Hery Purwanto, Wawancara dengan Seksi Data danInformasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 17 September 2020.

Santoso Adhy Wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 17 September 2020.